

SKRIPSI

ENDRO RISKI ERLAZUARDI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN

SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN

kk
Dag 10/03
ERL
P



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2003

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI
TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing

Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Penyusun

Endro Riski Erlazuardi

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2003

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
pada tanggal : 15 Juli 2003**

Panitia Penguji Skripsi

Ketua Naniek Endang W, S.H., M.S.

Anggota 1. Agus Yudha H, S.H., M.H.

2. Trisandini Prasestiah U, S.H., M.H.

3. Fifi Yunita, S.H., C.N.

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The signatures are in black ink and appear to be cursive or stylized. The first signature is on the top line, the second on the middle line, and the third on the bottom line.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah disebutkan pada bab II dan bab III, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada dasarnya seorang pasien dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan mengajukan bukti-bukti yang kuat. Adapun bukti-bukti yang memiliki hubungan erat dengan tindakan malpraktek dalam lingkup perumahsakitannya adalah *informed consent* dan *medical record*.
- b. Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pihak pasien dapat didasarkan pada *wanprestasi* atau *onrechtmatige daad*. Pihak-pihak yang dapat dikenakan gugatan ganti rugi atau yang wajib bertanggung gugat atas terjadinya malpraktek medis yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun moril bagi pasien adalah dokter dan rumah sakit tempat dokter tersebut bekerja.

2. Saran

- a. Sehubungan dengan masalah standar profesi yang ada sekarang ini, sebaiknya pemerintah segera membentuk standar profesi dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam UU Kesehatan. Sedangkan mengenai rekam medis yang dibuat oleh pihak rumah sakit, sebaiknya keterangan yang ada dalam rekam medis lebih diperlengkap sehingga pihak pasien merasa lebih jelas atas tindakan medis yang telah dilakukan padanya.
- b. Untuk lebih melindungi hak-hak pasien dan hak-hak dokter atau rumah sakit, sebaiknya segera dibentuk suatu peraturan yang mengatur tentang malpraktek medis. Dimana dalam UU Kesehatan hanya menyebutkan tetapi tidak mengatur lebih lanjut.